

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM SISTEM SELF ASSESSMENT (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Timur)

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari penerimaan pajak dalam negeri dimana pajak penghasilan orang pribadi termasuk di dalamnya. Dalam sistem *Self Assessment* yang dianut oleh Indonesia dimana wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri dari *Self Assessment* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata.

Permasalahan yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban wajib pajak penghasilan orang pribadi dalam sistem self assessment dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaksanaan sistem *Self Assessment*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti pelaksanaan dari kewajiban wajib pajak dalam sistem *Self Assessment* dan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaksanaan sistem *Self Assessment*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban wajib pajak dimana prosedur pelaksanaan pembayaran pajak yang tidak patuh dapat menyebabkan kerugian negara dimulai dari pelaksanaan kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan, kewajiban membayar pajak, kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan, kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan. Dalam hal ini wajib pajak dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya maka dalam Pasal 39 KUP menegaskan dapat dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun juga dapat merugikan Negara sebagai pemungut pajak. Serta penegakkan hukum terhadap WP yang tidak patuh dapat dilakukan dari Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan sampai dengan pelelangan. Untuk itu diharapkan kepada tidak hanya wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya juga peran dari fiskus selaku pelaksana pemungut pajak untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

KATA KUNCI: Sistem *Self Assessment*, Kewajiban Wajib Pajak

ABSTRACT
**JURIDICAL STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF TAX
PAYER'S OBLIGATION TO PERSONAL INCOME TAX IN SELF
ASSESSMENT SYSTEM**

(A Case Study in the Tax Service Agency of East Jakarta)

Tax is the backbone of states's revenue used by the government to finance goverment's activities. One of the revenue sources is from domestic is revenue including in personal income tax within it. In self assessment system adhered by Indonesia, tax payers must report all relevant information in a notification letter, calculate taxable basis, count tax debt, and pay the amount of tax debt. The procedure of tax collection using self assessment system will be successfully if people have good knowledge and high taxation discipline. The characters of self assessment are the presence of legal certainty, simple calculation, applicable, fairer and equal.

The problems emerged were in the implementation of tax payers obligation to personal income tax in self assessment system and the law enforcement against disobedient tax payers in the implementation of self assessment system. The aims of the research were to study in examine the implementation of tax payers in the implementation of self assessment system.

The research results show that the implementation of tax payers obligaton in disobedient tax payment procedure can lead the state's loss started from the implementation of the obligation to register themselves, to fill out nd submit the notification, the obligation to perform accounting and recording and the obligation to submit to documents at the time of checking. When tax payers intentionally do not perform their obligations, article 39 of Taxation General Regulation (KUP) affirms that they can be sentenced by imprisonment of 6 (six) months in minimum and 2 (two) years in maximum. They can also cause detriment to the state as the tax collector. In addition, to disobedient tax payers, the actions can be performed strated from sending Tax Collection Letter, Warning Letter, Forced Letter, the Warrant to Perform Confiscation. Until Auction. Therefore, it is expected not only to tax payers perform their obligation, but also role of fiscus to play their active roles in improving tax payers obedience.

KEYWORDS: Self Assessment System, Tax Payers liability